

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

Kabupaten Sumba Barat merupakan salah satu kabupaten yang berada di bagian barat Pulau Sumba, dengan letak berada pada 9°22'-9°47' Lintang Selatan dan 119°07'-119°33' Bujur Timur, dan memiliki batas-batas administratif pemerintahan:

- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sumba Tengah
- Sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sumba Barat Daya
- Sebelah utara berbatasan dengan Selat Sumba

Luas wilayah Kabupaten Sumba Barat adalah 737,42 Km². Jika luas wilayah daratan tersebut diakumulasikan dengan luas wilayah laut 441 Km², maka total wilayah Kabupaten Sumba Barat adalah 1.178,42 Km² (luas daratan 737,42 Km²+luas laut 441 Km²). Wilayah administrasi Kabupaten Sumba Barat memiliki 6 wilayah kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Loli, Kecamatan Kota Waikabubak, Kecamatan Lamboya, Kecamatan Wanukaka, Kecamatan Tana Righu, dan Kecamatan Laboya Barat.

Pulau Sumba pada awalnya hanya terdiri dari dua kabupaten yaitu Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Timur. Wilayah Sumba Barat, yang meliputi daerah-daerah Swapraja, Laura, Waijewa, Kodi, Lauhi, Mamboro, Umbu Ratu Nggay, Anakalang, Wanukaka, dan Lamboya⁴³. Kedua wilayah tersebut mengalami pemekaran wilayah menjadi Kabupaten Sumba Tengah dan Sumba Barat Daya.

⁴³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

Setiap kabupaten memiliki pemerintahannya sendiri. Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumba Barat terdiri dari kepala daerah dan DPRD. Kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Susunan perangkat daerah Kabupaten Sumba Barat meliputi, bupati, wakil bupati, sekretariat daerah, sekretaris daerah, sekretariat DPRD, sekretaris DPRD, inspektorat, 25 dinas daerah⁴⁴, 4 badan daerah⁴⁵, dan 6 kecamatan⁴⁶.

Sekretaris daerah mempunyai tugas membantu bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah, serta pelayanan administratif. Untuk melaksanakan tugasnya, sekretaris daerah mempunyai fungsi penyusunan kebijakan pemerintahan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemerintahan daerah, pelayanan administrasi dan pembinaan aparatur sipil negara pemerintahan daerah, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris daerah terdiri dari asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, asisten perekonomian dan pembangunan, serta asisten administrasi umum. Asisten ini membawahi bagian-bagian termasuk bagian hubungan masyarakat dan protokol.

⁴⁴1. Dinas Pendidikan, 2. Dinas Kesehatan, 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, 5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, 6. Dinas Sosial, 7. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 8. Dinas Pangan, 9. Dinas Pertanahan, 10. Dinas Lingkungan Hidup, 11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, 13. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 14. Dinas Perhubungan, 15. Dinas Komunikasi dan Informatika, 16. Dinas Koperasi, 17. Usaha Kecil dan Menengah, 18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 19. Dinas Kepemudaan dan Olahraga, 20. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 21. Dinas Kelautan dan Perikanan, 22. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 23. Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 24. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, 25. Dinas Peternakan.

⁴⁵1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2. Badan Keuangan, Aset, dan Pendapatan Daerah, 3. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, 4. Badan Penelitian dan Pengembangan.

⁴⁶1. Kecamatan Tanarighu, 2. Kecamatan Loli, 3. Kecamatan Waikabubak, 4. Kecamatan Wanukaka, 5. Kecamatan Lamboya dan 6. Kecamatan Laboya Barat.

Berikut ini merupakan struktur organisasi sekretariat daerah Kabupaten Sumba Barat.



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat

Sumber: Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat

Berdasarkan struktur organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat diatas, bagian Humas dan Protokol Kabupaten Sumba Barat termasuk dalam lingkup asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.

Asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat memiliki tugas membantu sekretariat daerah dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pelayanan

administrasi, pemantauan dan evaluasi bagian tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, humas dan protokol, melaksanakan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan pendidikan, kesehatan, kepemudaan dan olahraga, ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan, kependudukan dan pencatatan sipil serta pemberdayaan masyarakat dan desa.

4.2 Visi dan Misi Humas Kabupaten Sumba Barat

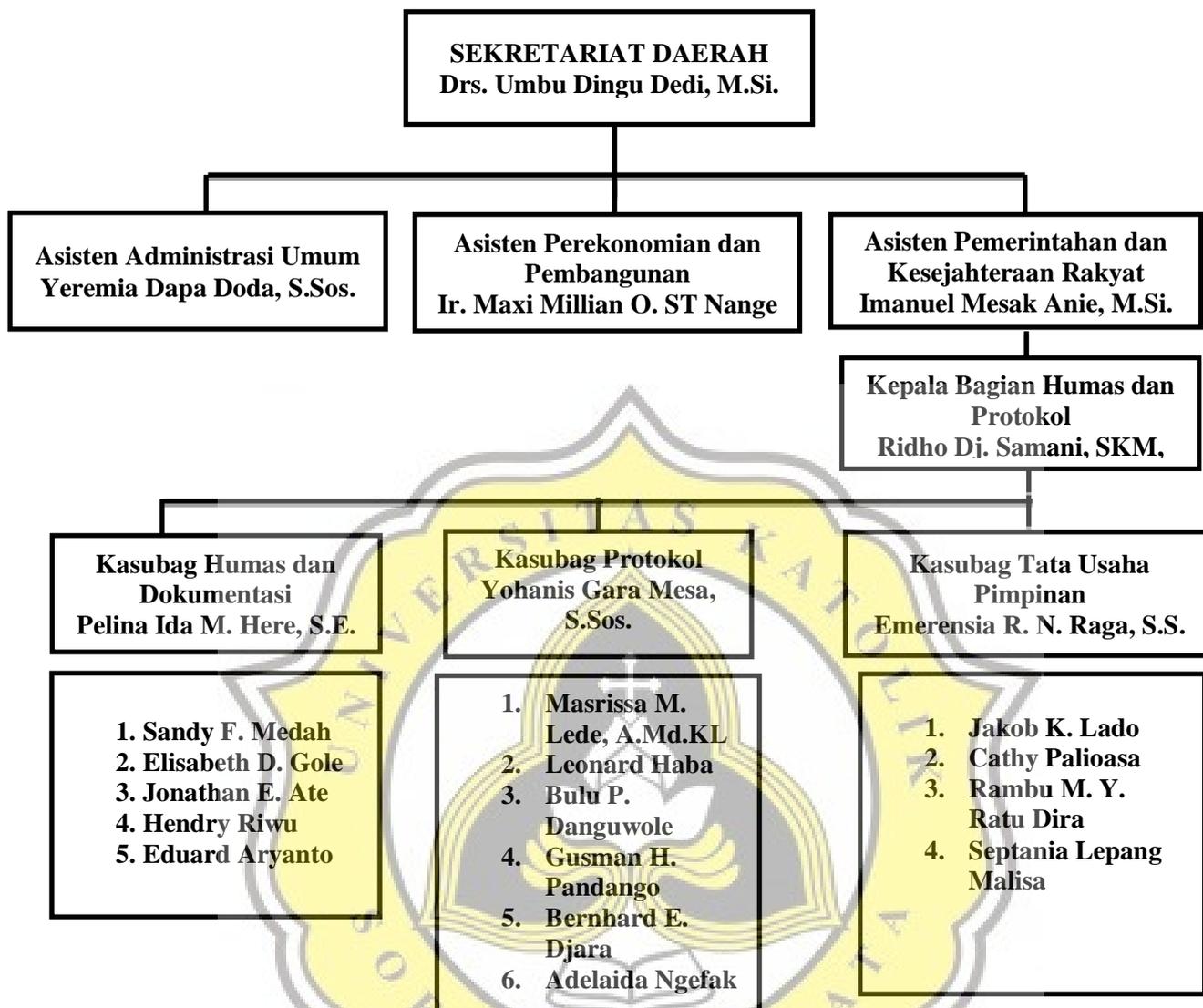
Bagian Humas dan Protokol Kabupaten Sumba Barat memiliki visi profesional dalam mengemban tugas kehumasan dan keprotokolan demi terwujudnya pemerintahan yang berkualitas.

Untuk mewujudkan visi di atas telah ditetapkan misi yang akan dilaksanakan, yaitu⁴⁷:

- a. Mewujudkan pelayanan kehumasan dan dokumentasi, publikasi urusan pengumpulan informasi, pemberitaan yang informasi, berimbang dan akuntabel.
- b. Mewujudkan pelaksanaan pelayanan keprotokolan, acara, dan tamu tegara yang profesional.
- c. Mewujudkan pelaksanaan pelayanan tata usaha pimpinan dan pengkoordinasian perjalanan pimpinan yang efisien.

Berikut adalah struktur organisasi bagian Humas dan Protokol Kabupaten Sumba Barat.

⁴⁷Bagian Humas dan Protokol Kabupaten Sumba Barat,2019,*Laporan Kinerja Bagian Humas dan Protokol Kabupaten Sumba Barat Tahun 2019*, halaman 2.



**Gambar 4.2 Struktur Organisasi Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kabupaten Sumba Barat**

Sumber: Bagan struktur organisasi dan tata kerja bagian Humas dan Protokol
Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat

Bagian Humas dan Protokol Kabupaten Sumba Barat memiliki tiga subbagian yaitu, subbagian humas dan dokumentasi, subbagian protokol, dan subbagian tata usaha pimpinan.

Subbagian humas dan dokumentasi, subbagian protokol, dan subbagian tata usaha pimpinan melaksanakan tugas penyiapan perumusan kebijakan,

pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan⁴⁸.

Dalam penelitian ini hanya memfokuskan pada subbagian humas dan dokumentasi, karena hanya meneliti spesifik tentang bagaimana bagian humas menjalankan tugasnya sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan.

Penelitian ini juga memfokuskan pada subbagian humas dan dokumentasi karena di pemerintahan daerah, bagian humas harus dapat menjalankan tugas sesuai dengan apa yang tertulis di dalam peraturan. Hal tersebut dilakukan supaya tidak terjadi tumpang tindih dengan tugas bagian yang lain, karena masing-masing sudah mempunyai tugasnya sendiri. Hasil observasi penelitian terhadap pengaturan tentang tugas humas di 12 kabupaten dari 22 kabupaten kota se-Nusa Tenggara Timur ditemukan ada pengaturan secara spesifik mengenai tugas dan tata kelola humas. Di 12 kabupaten kota itu, setiap bagian diuraikan sesuai karakteristik dan nomenklatur pada bagian humas.

Hal ini berbeda dengan tugashumas di Kabupaten Sumba Barat yang bersifat umum. Tugas Humas Kabupaten Sumba Barat yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2016 adalah melaksanakan tugas pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta harmonisasi urusan humas dan dokumentasi⁴⁹.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2016, tugas pada semua bagian di sekretariat daerah substansinya sama, tidak diuraikan secara spesifik.

⁴⁸Peraturan Bupati Sumba Barat Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Pasal 9 ayat (3) huruf a, b dan c

⁴⁹ Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat dalam Pasal 4 ayat (6) huruf c

Sedangkan dalam implementasinya bagian humas tidak dapat melaksanakan semua fungsi yang tertuang dalam peraturan bupati tersebut dan humas dalam menjalankan tugas tidak berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsi berdasarkan peraturan bupati, karena fungsi selain urusan humas dan dokumentasi dilaksanakan oleh bagian lain.

4.3 Strategi Humas Protokol Kabupaten Sumba Barat

1) Membangun Hubungan Internal dan Eksternal

a. Hubungan Internal

Humas Kabupaten Sumba Barat membangun hubungan internal dengan pemerintah meliputi pimpinan daerah, sekretariat daerah, dinas daerah, badan daerah, dan kecamatan. Hubungan internal yang dibangun dengan kepala daerah yaitu bupati, wakil bupati, dan sekretaris daerah dengan cara mendampingi setiap kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan daerah. Selain mendampingi pimpinan daerah, bagian humas juga meliput kegiatan yang dilakukan pimpinan daerah untuk menginformasikan kepada masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya berita-berita yang dibagikan oleh bagian humas di akun media sosial yaitu *facebook*.

Selanjutnya bagian humas juga membangun hubungan internal dengan dinas daerah, badan daerah, dan kecamatan, tetapi di sini humas hanya saling berkoordinasi jika ada kebutuhan mendampingi dan meliput kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas daerah, badan daerah, dan kecamatan yang dihadiri oleh pimpinan daerah. Koordinasi yang dilakukan ini melalui pemberitahuan secara langsung ke ruangan humas atau biasanya lewat kontak pribadi Kabag Humas Kabupaten Sumba Barat.

Menurut Kasubag Humas Kabupaten Sumba Barat, Pelina Ida M. Here hubungan kepala daerah, dinas daerah, badan daerah, dan kecamatan dengan bagian humas sudah sangat baik, karena beberapa faktor, seperti sudah saling mengenal satu sama lain, ada hubungan saudara dan kedekatan

secara emosional sehingga tidak susah untuk membangun *chemistry* antara satu dengan yang lain. “Dengan kepala daerah pun kami sudah dianggap sebagai anak sendiri sehingga mudah menjalani hubungan satu sama lain, tetapi tetap saja menghormati dan menghargai posisi masing-masing di pemerintahan⁵⁰.”

Di bawah ini merupakan kegiatan pimpinan daerah yang didampingi oleh bagian Humas Kabupaten Sumba Barat.

Tabel 4.1. Kegiatan Bupati Yang Didampingi Humas

| No. | Kegiatan |
|-----|---|
| 1. | Turun Pasar Himbau Pedagang Jaga Kebersihan |
| 2. | Melakukan MoU dengan Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA |
| 3. | Menghadiri Seminar Presentasi Hasil <i>Benchmarking</i> Peserta Diklat Pim IV Tematik Kepariwisata Kabupaten Sumba Barat |
| 4. | Menghadiri Rakornas Bidang Kewaspadaan Nasional Pemilu Tahun 2019 di Jakarta |
| 5. | Menghadiri Pelantikan Sekda Sumba Timur |
| 6. | Menghadiri Rakesda Provinsi NTT Tahun 2019 |
| 7. | Menghadiri Puncak Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Provinsi NTT Bertempat di Swiss Berlin Hotel, Jalan Timor Raya Kupang bersama Bupati dan Wakil Bupati dari 21 Kecamatan se- Provinsi NTT |
| 8. | Memberikan Penghargaan di Bidang Olahraga |
| 9. | Menghadiri Rakornas Penanganan Konflik Sosial |
| 10. | Mempresentasikan Eliminasi Malaria di Kabupaten Sumba Barat |
| 11. | Meninjau Akreditasi UPT Puskesmas Weekarou |
| 12. | Menghadiri Penyerahan Bantuan Kepada Siswa Siswi SMP Lamboya |
| 13. | Melayat ke Rumah Duka Almarhum Bupati Ende |
| 14. | Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luara Biasa Bank NTT |
| 15. | Memimpin Kerja Bakti |
| 16. | Melepas Distribusi Logistik Pemilu Tahun 2019 |
| 17. | Melakukan Silaturahmi di Hari Pertama Lebaran |
| 18. | Melakukan Panen Bersama Jagung Hibrida Varieas di Lamboya |
| 19. | Mengunjungi Proyek Pembangunan Raung VVIP RSUD Waikabubak, Minta Selesai Sesuai Target |
| 20. | Mendukung Program Produksi Daun Kelor/Marungga |
| 21. | Melepas Peserta Gerak Jalan Putra Tingkat Kabupaten Sumba Barat |
| 22. | Mengukuhkan Anggota Paskibra Angkatan Ke-47 |
| 23. | Memimpin Apel Pagi |

⁵⁰Wawancara dengan Kasubag Humas Kabupaten Sumba Barat, Pelina Ida M. Here. Rabu, 22 Januari 2020, pukul 10.00 WITA di Ruang Humas dan Protokol Kabupaten Sumba Barat

| | |
|-----|--|
| 24. | Melakukan Peantauan Pasar Inpres Waikabubak |
| 25. | Memimpin Apel Pagi dan Memberikan Arahan Agar Mengikuti Germas |
| 26. | Memberitahukan Tahun Depan Pameran Pembangunan Ditiadakan |
| 27. | Menghadiri Rakor Bersama Garuda di Bali |
| 28. | Mengukuhkan Dewa Pengurus Komite SMP Kristen Waikabubak |
| 29. | Menghadiri Peresmian Gereja Kristen Sobawawi |
| 30. | Menghadiri Upacara “Joko Kaha” di Ternate |
| 31. | Melepas Peserta Latsar CPNS Tahun 2018 |
| 32. | Memimpi Apel Pagi |
| 33. | Meninjau Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak |
| 34. | Menghadiri Pelantikan Pimpinan DPRD Kabupaten Sumba Barat |
| 35. | Meninjau Ruas Jalan Ring Road Di Desa Uburaya |
| 36. | Melakukan Sidak di Badan Keuangan Aset dan Pendapatan Daerah |
| 37. | Menyerahkan Program Pamsimas III Di Desa Elu Loada dan Monitoring Persiapan Pasola |
| 38. | Meresmikan Pasar Rakyat Desa Karekanduku Selatan Kec. Tana Righu |
| 39. | Pasca Kebakaran, Menyambangi Warganya |
| 40. | Meninjau Lokasi Stan Pameran Pembangunan |
| 41. | Mengajak Masyarakat Menabung Sejak Dini Untuk Masa Depan Anak |
| 42. | Mengunjungi Puskesmas Kareka Nduku |
| 43. | Menghadiri Acara Syukuran HUT TNI |
| 44. | Meresmikan Gedung GB Bina Delo Desa Bodo Huba |
| 45. | Pantau Pekerjaan Puskesmas Weekarau |
| 46. | Meresmikan Launching Area Wi-Fi Gratis 4 Titik di Kota Waikabubak |
| 47. | Meresmikan Peluncuran Festival Kampung Tarung Waitabar |
| 48. | Memberikan Motivasi Bagi Anak-Anak Peserta Lomba Cerdas Cermat |
| 49. | Satu Buah Rumah Terbakar, Bupati Dapawole Langsung Turun Ke Lokasi Kebakaran |

Sumber: Siaran Pers Humas Kabupaten Sumba Barat Tahun 2017, 2018, dan 2019.

Tabel 4.2. Kegiatan Wakil Bupati Yang Didampingi Humas

| No. | Kegiatan |
|-----|---|
| 1. | Menghadiri Acara Peresmian Pasar Rakyat 2019 dan Pasar Rakyat Indonesia Award 2019 |
| 2. | Menghadiri Kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi se-Provinsi NTT Dalam Rangkain Pekan Pencegahan Korupsi Terintegrasi |
| 3. | Mengikuti Workshop Penatalaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Pasca Monitoring Provinsi NTT |
| 4. | Melakukan Koordinasi ke Bappeda Provinsi NTT |
| 5. | Meresmikan Gedung Learning Center Hobawawi |
| 6. | Memantau Kebun dan Sawah Masyarakat |
| 7. | Meninjau Pembangunan Fisik di Kecamatan Kota Waikabubak |

| | |
|-----|---|
| 8. | Menghimbau Kepala Sekolah se- Kabupaten Sumba Barat Agar Memiliki NUKS (Nomor Unit Kepala Sekolah) |
| 9. | Menghadiri Parade Kuda Sandlewood dan Tenun Ikat di Kabupaten Sumba Barat |
| 10. | Mengunjungi Korban Kebakaran di Kampung Ubu Bewi |
| 11. | Melakukan Monev Hari Kedua Dalam di Kelurahan Se-Kecamatan Kota Waikabubak |
| 12. | Melakukan Monev Dalam Rangka Kebersihan dan Keindahan Desa |
| 13. | Melakukan Konsultasi Penentuan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketengakerjaan Bagi Tenaga Kontrak Daerah dan Aparat Desa |

Sumber: Siaran Pers Humas Kabupaten Sumba Barat Tahun 2017, 2018, dan 2019.

Tabel 4.3. Kegiatan Sekretaris Daerah Yang Didampingi Humas

| No. | Kegiatan |
|-----|--------------------------------------|
| 1. | Meakukan Kunjungan Ke SMPN 6 Lamboya |

Sumber: Siaran Pers Humas Kabupaten Sumba Barat Tahun 2017, 2018, dan 2019.

Saat ini bagian humas lebih banyak membangun hubungan internal dengan kepala daerah saja, karena tugas humas hanya bertugas mendampingi kegiatan pimpinan daerah untuk meliputi dan membagikannya kepada masyarakat. Humas lebih banyak mendampingi kepala daerah karena setiap kegiatan pemerintahan kepala daerah yang paling diutamakan untuk hadir, jika kepala daerah sedang keluar kota atau mempunyai kesibukan lain baru bisa wakili oleh wakil bupati atau sekretaris daerah. Kalaupun wakil bupati dan sekretaris daerah mempunyai kegiatan lain, maka akan digantikan oleh kepala dinas atau disebut sebagai perwakilan yang ditunjuk oleh kepala daerah itu sendiri.

b. Hubungan Eksternal

Humas Kabupaten Sumba Barat membangun hubungan eksternal dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan yaitu pengusaha, lembaga sosial-budaya, instansi lain, TNI, dan Polri.

Humas Kabupaten Sumba Barat membangun hubungan dengan masyarakat melalui informasi-informasi yang selalu *update* setiap harinya melalui *facebook*. Selain memberikan informasi, bagian Humas Kabupaten

Sumba Barat juga selalu merespon tanggapan masyarakat melalui kolom komentar di *facebook*. Menurut Kasubag Humas Kabupaten Sumba Barat, Pelina Ida M. Here, dengan adanya informasi yang selalu di *update* di *facebook* masyarakat jadi lebih mengetahui apa yang menjadi kegiatan kepala daerah sehingga bisa meminimalisir isu-isu miring yang berkaitan dengan kepala daerah.

Selain itu, Humas Kabupaten Sumba Barat membangun hubungan dengan para pengusaha seperti pemilik hotel dan pengusaha lain yang ada di Kabupaten Sumba Barat. Jika ada kegiatan besar, Humas Kabupaten Sumba Barat selalu mengundang para pengusaha untuk ikut hadir dan ambil bagian dalam acara tersebut. Dengan keterlibatan ini, hubungan antara humas sebagai perwakilan pemerintah dan para pemangku kepentingan akan terjalin hubungan baik. Contoh lain humas juga membangun hubungan eksternal dengan para TNI, Polri dan lembaga sosial. Hubungan yang dibangun ini bertujuan agar tujuan pemerintah Sumba Barat dapat tercapai dalam hal keamanan, tatanan sosial Kabupaten Sumba Barat dapat berjalan dengan lancar.

Untuk instansi lain atau pimpinan daerah dari luar daerah, Humas Kabupaten Sumba Barat juga berperan untuk mendampingi, meliputi kegiatan kunjungan yang dilakukan di Kabupaten Sumba Barat. Humas ikut mendampingi karena setiap ada kunjungan atau kegiatan yang dihadiri oleh para tamu dari luar daerah, pimpinan daerah Kabupaten Sumba Barat pasti hadir dan selalu mendampingi para tamu sampai kegiatan selesai. Tugas humas adalah mendampingi pimpinan daerah, karena itu kegiatan yang dihadiri oleh pimpinan daerah pasti dihadiri juga oleh humas.

Humas Kabupaten Sumba Barat lebih banyak membangun hubungan eksternal dengan instansi lain atau pimpinan daerah dari daerah lain yang berkunjung ke Kabupaten Sumba Barat karena pada kegiatan kunjungan tersebut pimpinan daerah Kabupaten Sumba Barat selalu hadir dan

mendampingi para tamu. Selain itu, humas juga mempunyai kepentingan untuk meliput kegiatan kunjungan yang dilakukan oleh tamu dari luar daerah yang akan dibagikan kepada masyarakat melalui media *facebook*.

2) Penyelenggaraan Pertemuan dan Koordinasi Antar Instansi

Pada hakekatnya Humas Kabupaten Sumba Barat tidak pernah menyelenggarakan pertemuan secara langsung dengan instansi karena tidak mempunyai wewenang. Mekanisme yang berjalan selama ini instansi yang akan melaksanakan kegiatan akan langsung menghubungi bagian humas untuk menginformasikan kegiatan dan meminta bagian humas mempublikasikan kegiatan tersebut ke media *facebook*.

Kasubag Humas Kabupaten Sumba Barat, Pelina Ida M. Here menyatakan bahwa mekanisme koordinasi dengan instansi lain dengan cara setiap instansi yang akan mengadakan kegiatan atau rapat langsung menghubungi bagian humas melalui *whatsapp* pribadi Kasubag Humas Kabupaten Sumba Barat atau melalui surat yang ditujukan langsung kepada Bagian Humas dan Protokol Kabupaten Sumba Barat. Penyampaian ini bermaksud agar dapat meliput dan mempublikasikan kegiatan yang dilakukan oleh instansi untuk dibagikan kepada masyarakat melalui media *facebook*⁵¹. Tetapi humas hanya meliput kegiatan atau pertemuan antar instansi jika dihadiri oleh pimpinan daerah atau yang mewakili bilamana pimpinan daerah tidak bisa hadir.

Hal tersebut diatas tidak sesuai dengan teori strategi humas menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah yaitu humas sebagai penyelenggara pertemuan dan koordinasi antara instansi.

Humas Kabupaten Sumba Barat ternyata tidak memiliki wewenang untuk mengadakan pertemuan antara instansi di ruang lingkup Pemerintahan Kabupaten

⁵¹*Ibid.*

Sumba Barat. Hal ini disebabkan karena setiap pertemuan yang diadakan terjadi atas izin pimpinan daerah atau kepala dinas saja atau yang mempunyai wewenang. Dalam melakukan koordinasi dengan instansi lain, Humas Kabupaten Sumba Barat hanya melakukan koordinasi untuk kepentingan pembuatan berita tentang kegiatan yang dilaksanakan dan dipublikasikan melalui media *facebook*.

3) Penyedia Informasi Pemerintah

Untuk penyedia informasi pemerintahan dari semua Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan di Kabupaten Sumba Barat tentang pembangunan, infrastruktur, potensi daerah, dan informasi publik merupakan tugas dari DKIPS. Informasi ini dibagikan melalui situs resmi Kabupaten Sumba Barat yang di kelola oleh DKIPS itu sendiri. Situs resmi Kabupaten Sumba Barat bernama <https://sumbabaratkab.go.id>. Hal tersebut tidak sesuai dengan teori yang ada, karena bukan bagian humas yang menyediakan informasi pemerintah, bagian humas hanya menyediakan informasi khusus tentang kegiatan pimpinan daerah saja yang dibagikan melalui akun media sosial, yaitu *facebook*. Humas dan DKIPS bekerjasama dalam hal menginformasikan kegiatan pemerintahan Kabupaten Sumba Barat karena sumber pemberitaan yang dipublikasikan oleh DKIPS melalui situs resmi juga bersumber bagian humas yang selalu mendampingi pimpinan daerah dalam setiap kegiatan.

Di bawah ini merupakan gambar situs resmi Kabupaten Sumba Barat yang dikelola oleh DKIPS dan akun media sosial *facebook* yang dikelola oleh bagian Humas Kabupaten Sumba Barat.



Gambar 4.1 Situs Sumba Barat dan Facebook Humas

Sumber: Akun *Facebook* Humas Protokol Kabupaten Sumba Barat dan Situs <https://sumbabaratkab.go.id> tahun 2020

Penyedia informasi pemerintah Kabupaten Sumba Barat dikelola oleh DKIPS bukan oleh Bagian Humas Kabupaten Sumba Barat. Perbedaan antara kedua sumber informasi ini, *facebook* yang dikelola oleh bagian humas hanya mempublikasikan informasi tentang kegiatan pimpinan daerah saja, sedangkan situs resmi yang dikelola oleh DKIPS mempublikasikan tentang semua informasi pemerintahan Kabupaten Sumba Barat.

4) Pengatur Pertemuan Instansi Pemerintah Dengan Media Massa

Dalam hal menjalin berhubungan dengan media massa, Humas Kabupaten Sumba Barat tidak pernah mengadakan pertemuan antara pemerintah dan media massa secara langsung. Humas Kabupaten Sumba Barat menjadi wakil pemerintah untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh media massa dalam bentuk siaran pers yang bersifat jurnalistik. Siaran pers ini diberikan melalui email pribadi kasubag humas. Media massa dan Humas Kabupaten Sumba Barat saling berkoordinasi jika diadakan kegiatan besar di Sumba Barat seperti Festival 1001 Kuda yang dihadiri oleh Presiden dan Menteri Republik Indonesia. Koordinasi yang dilakukan adalah pemberian siaran pers yang bersifat jurnalistik

dari humas Sumba Barat kepada media luar sebagai bahan dasar pembuatan berita.

Di bawah ini merupakan contoh berita yang dibuat oleh media lain dan bersumber dari siaran persHumas Kabupaten Sumba Barat.



Gambar 4.2 Pos Kupang
Sumber: POS-Kupang, diakses pada 23 Mei 2020, pukul 16.00 WIB



Gambar 4.3 Liputan 6
Sumber: Liputan6.com, diakses pada 23 Mei 2020, pukul 16.00 WIB

Menurut Kasubag Humas Kabupaten Sumba Barat, Pelina Ida M. Here, pemberian siaran perssecara langsung dari humas ke media massa dipercaya dapat mengatur konflik yang akan terjadi. Karena siaran pers yang dibuat tidak memiliki

unsur kepentingan pribadi, sehingga tidak timbul isu-isu yang menjatuhkan pemerintahan Kabupaten Sumba Barat⁵².

Melalui fakta-fakta, Humas Kabupaten Sumba Barat dan media massa hanya saling berkoordinasi melalui kontak pribadi, tidak ada pertemuan khusus antara instansi dan media massa yang diatur oleh Humas Kabupaten Sumba Barat. Hal lain juga yang menyebabkan tidak ada pertemuan khusus secara langsung antara media massa dan pemerintah Sumba Barat karena media luar jarang terjun langsung ke Kabupaten Sumba Barat untuk meliput, oleh karena itu media luar hanya menghubungi bagian humas menggunakan kontak pribadi yang didapatkan melalui *facebook* ataupun situs resmi.

5) Pendorong Upaya Pemberdayaan Masyarakat

Humas Kabupaten Sumba Barat mengawasi semua kegiatan dan program pemerintahan untuk menyampaikan kepada masyarakat melalui media *facebook* dan situs resmi Sumba Barat. Informasi ini nantinya bertujuan agar masyarakat mengetahui perkembangan program dan kegiatan yang dilaksanakan pemerintah. Informasi ini disampaikan melalui akun *facebook* atau situs resmi Humas Kabupaten Sumba Barat.

Pada akun *facebook* Humas Kabupaten Sumba Barat menginformasikan tentang kegiatan kepala daerah, sedangkan pada situs resmi Kabupaten Sumba Barat menginformasikan secara menyeluruh tentang Pemerintahan Kabupaten Sumba Barat dan informasi publik yang meliputi dokumen perencanaan, produk hukum, layanan perizinan, transparansi anggaran, transparansi dana desa, dan laporan Kabupaten Sumba Barat dalam angka.

Dibawah ini merupakan gambar akun *facebook* dan situs yang digunakan untuk memberikan informasi publik.

⁵²*Ibid.*



Gambar 4.4 Situs Resmi Kabupaten Sumba Barat dan Facebook

Sumber: Akun Facebook Humas Protokol Kabupaten Sumba Barat dan Situs <https://sumbaratkab.go.id/> tahun 2020

Dengan adanya media massa, Humas Kabupaten Sumba Barat menjadi pendorong upaya pemberdayaan masyarakat dengan keterbukaan informasi-informasi yang selalu diberikan kepada masyarakat dalam peningkatan mutu yang berkualitas terhadap pendorong upaya pemberdayaan daerah.

6) Pengelola Sarana dan Prasarana Kehumasan

Dibagian Humas Kabupaten Sumba Barat, sarana dan prasana masih kurang lengkap. Ruangan khusus bagian humas hanya satu dan ukurannya kecil, alat yang tersedia untuk mendokumentasikan kegiatan kepala daerah hanya menggunakan dua kamera. Menurut kasubag humas saat diwawancarai, kurangnya perlengkapan yang digunakan oleh bagian humas karena terkadang kamera dipinjam oleh instansi lain. Selain itu, hanya ada satu unit laptop yang tersedia dan dipakai oleh kasubag untuk membuat berita. Satu unit komputer yang digunakan untuk mengedit foto dan satu unit alat *print* yang digunakan bersama-sama dengan bagian protokol dan tata usaha.

Sementara sarana lainnya seperti kendaraan tersedia satu mobil yang digunakan oleh Kepala Bagian Humas dan Protokol Kabupaten Sumba Barat, sehingga terkadang bagian humas menggunakan kendaraan pribadi.

Dibawah ini merupakan gambar sarana dan prasana di Humas Kabupaten Sumba Barat.



Gambar 4.5 Peralatan Bagian Humas

Sumber: Dokumentasi Penelitian, Tanggal 20 Januari 2020

Bagian Humas Kabupaten Sumba Barat masih kekurangan sarana dan prasarana yang berdampak pada hasil kerja menjadi kurang efektif. Dengan kurangnya sarana dan prasarana yang ada di bagian humas, kegiatan yang dilakukan oleh humas kadang terhambat, contohnya saja jika ingin mendampingi pimpinan daerah untuk mengikuti kegiatan di kabupaten lain, humas harus menumpang dikendaraan bagian lain karena kendaraan humas sendiri sudah digunakan oleh bagian protokol untuk ke lokasi. Ini yang menyebabkan kurang efektifnya humas dalam bertugas.

7) Pembentuk Citra dan Reputasi Positif Instansi Pemerintah

Humas Kabupaten Sumba Barat mengelola informasi yang akan dibagikan kepada masyarakat dengan cara mengoreksi dahulu informasi yang akan dibagikan. Selain itu, memilah dengan teliti informasi yang layak dipublikasikan. Hal tersebut bertujuan agar tetap menjaga citra baik pemerintah. Apabila pembentukan citra dilakukan dengan baik, maka tugas selanjutnya adalah mempertahankan citra yang sudah ada. Tugas lainnya yaitu, menyelesaikan isu-isu yang ada di masyarakat, khususnya isu-isu tentang pemerintah, seperti memberikan klarifikasi yang baik perihal isu negatif. Kasubag Humas Kabupaten Sumba Barat biasanya memberikan klarifikasi tentang isu-isu negatif yang beredar melalui akun *facebook* Humas Kabupaten Sumba Barat atau melalui akun *whatsapp*.

Menurut Kasubag Humas Kabupaten Sumba Barat, citra dan reputasi positif instansi pemerintah terbentuk karena kelancaran informasi yang selalu diberikan oleh Humas Kabupaten Sumba Barat dan DKIPS yang berisikan tentang informasi kegiatan kepala daerah dan pembangunan⁵³. Masyarakat bisa mengikuti perkembangan pembangunan di pemerintahan Kabupaten Sumba Barat.

8) Pengelola Informasi Pemerintah dan Pembangunan

Humas Kabupaten Sumba Barat bertugas memberikan informasi tentang kegiatan pimpinan daerah yaitu bupati, wakil bupati, dan sekretariat daerah. Humas memberikan informasi melalui akun *facebook* yang dikelola oleh Humas Kabupaten Sumba Barat.

Tugasnya meliputi penyampaian dan mengelola informasi pemerintah kepada publik secara terbuka. Tentang siklus pengelolaan pembangunan daerah mulai dari tahap perencanaan sampai evaluasi. Perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pemeriksaan dan pelaporan, serta evaluasi dilakukan oleh DKIPS melalui situs resmi Kabupaten Sumba Barat.

⁵³*Ibid.*

Dibawah ini merupakan gambar situs Humas Kabupaten Sumba Barat yang berisi tentang informasi publik yang didalamnya berisi tentang semua informasi pemerintah dan pembangunan.



Gambar 4.6 Situs Tentang Dokumen Perencanaan Daerah

Sumber: Situs Resmi Kabupaten Sumba Barat <https://sumbaratkab.go.id> tahun 2020

Pengelola informasi pemerintah dan pembangunan tidak dilakukan oleh bagian Humas Kabupaten Sumba Barat, melainkan oleh DKIPS melalui situs resmi Kabupaten Sumba Barat.

4.4 Asas Umum Humas Kabupaten Sumba Barat⁵⁴

1) Keterbukaan

Humas Kabupaten Sumba Barat bersifat terbuka dalam menyampaikan informasi kepada publik dengan menyampaikan informasi yang sederhana dan

⁵⁴Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. No. 30. Tahun 2011. Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah. Bab II. Bagian D.

mudah dimengerti. Informasi yang disampaikan berisi tentang apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Isi informasi tidak berpihak kepada siapapun, karena informasi yang disampaikan hanya untuk kepentingan masyarakat.

Kasubag Humas Kabupaten Sumba Barat mengatakan dalam sistem peyampaian informasi selalu memberikan informasi yang tepat, cepat, dan akurat agar hak masyarakat atas kebutuhan informasi dapat terpenuhi. Seperti informasi kegiatan Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat, seperti pembangunan sekolah atau yang lainnya⁵⁵.

Informasi dibagikan melalui akun *facebook* maupun situs resmi Kabupaten Sumba Barat, memuat informasi tentang semua kegiatan pemerintahan daerah dan kegiatan masyarakat. Dalam media yang dimiliki ini masyarakat dapat merespon dengan memberikan masukan, pertanyaan, keluhan terhadap berita tersebut. Melalui akun *facebook* masyarakat dapat merespon langsung dengan cara mengomentari *postingan* yang dibagikan atau melalui nomor telepon dan email resmi yang bisa dihubungi. Untuk situs resmi, masyarakat bisa mengunjungi <https://sumbabaratkab.go.id>

⁵⁵Wawancara dengan Kasubag Humas Kabupaten Sumba Barat, Pelina Ida M. Here. Rabu, 22 Januari 2020, pukul 10.00 WITA di Ruang Humas dan Protokol Kabupaten Sumba Barat



Gambar 4.7 Kontak Situs

Sumber: <https://sumbaratkab.go.id> diakses pada tanggal 24 April 2020 pukul 13.00 WIB

Humas Kabupaten Sumba Barat belum bisa memastikan perihal apakah hak masyarakat tentang informasi sudah terpenuhi atau belum. Ini dikarenakan pihak Humas Kabupaten Sumba Barat tidak mengetahui informasi apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat karena informasi yang dibagikan hanya tentang kegiatan Pimpinan Daerah.

2) Objektif

Dalam menjalankan tugas dan memberikan informasi kepada masyarakat. Humas Kabupaten Sumba Barat memberikan informasi yang benar-benar resmi dari suatu lembaga atau informasi yang benar-benar sedang dilakukan oleh pemerintah. Kasubag Humas Kabupaten Sumba Barat, Pelina Ida M. Here menyatakan informasi yang disampaikan tidak berpihak kepada pihak manapun, informasi itu juga tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang sedang dijalankan. Misalnya mementingkan kepentingan politik tertentu atau kepentingan pencitraan yang bisa membuat masyarakat terpengaruh.

Karena itu Kasubag Humas Kabupaten Sumba Barat menambahkan selalu melakukan pengontrolan terhadap semua kegiatan, agar terhindar dari

kemungkinan pemberitaan yang tidak tepat atau merugikan. Pengontrolan tidak dapat dilakukan pada media-media luar yang memuat isu-isu tidak benar, dalam hal seperti ini Humas Kabupaten Sumba Barat hanya dapat melakukan manajemen konflik yaitu dengan cara tidak menyebarkan informasi yang dibuat oleh media luar, memberikan siaran pers yang bersifat jurnaslistik kepada media yang membutuhkan⁵⁶.

Informasi yang dibagikan oleh bagian Humas Kabupaten Sumba Barat kepada masyarakat merupakan informasi kegiatan Pimpinan Daerah yang benar-benar terjadi dan dilaksanakan. Baik itu di wilayah Pulau Sumba maupun luar wilayah Pulau Sumba.

3) Jujur

Bagian Humas Kabupaten Sumba Barat dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dengan melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang ada dalam hal disiplin. Selain itu, memiliki etika saat berbicara dengan siapapun, baik tamu dari dalam daerah maupun dari luar daerah, serta kepada kepala daerah. Humas Kabupaten Sumba Barat juga harus memiliki perilaku yang baik, bertanggung jawab dengan tugas yang sudah diberikan, serta dapat memposisikan diri ketika berhadapan dengan kepala daerah dan masyarakat.

Kasubag Humas Kabupaten Sumba Barat menyatakan bahwa tekad yang terjadi kesalahpahaman antara karyawan yang satu dengan yang lain, karena tidak berperilaku sopan saat berbicara. Hal tersebut mengakibatkan ketersinggungan, sehingga membuat suasana tidak nyaman⁵⁷. Sementara Kasubag Humas Kabupaten Sumba Barat tidak bisa memberikan contoh yang konkret perihal etika, seperti yang ditanyakan peneliti.

⁵⁶*Ibid.*

⁵⁷*Ibid.*

4) Tepat janji

Humas Kabupaten Sumba Barat belum konsisten mengenai waktu, seperti terlambat datang ke kantor. Terkadang ada kegiatan yang harus didampingi, menjadi terbengkalai, hingga akhirnya digantikan oleh bagian yang lain, yaitu tata usaha. Hal tersebut dipandang kurang baik dan terkesan tidak bertanggung jawab dalam menjalankan tugas, baik oleh kepala daerah maupun instansi lain.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Bagian Humas Kabupaten Sumba Barat dapat berkoordinasi dengan ajudan bupati dan bagian protokoler, supaya mengetahui jadwal kepala daerah. Dengan adanya jadwal, Humas Kabupaten Sumba Barat mudah dalam melaksanakan tugasnya yaitu, mendampingi kegiatan kepala daerah tanpa harus terlambat.

5) Etis

Dalam menjalankan tugasnya, Humas Kabupaten Sumba Barat masih belum bisa menjaga wibawa Pemerintah Kabupaten Sumba Barat, misalnya dengan duduk berkumpul saat bertugas. Padahal pada saat yang sama, kegiatan yang dihadiri oleh kepala daerah, bupati, dan wakil bupati sedang berlangsung. Seharusnya pihak humas cekatan dalam mendokumentasikan kegiatan yang berlangsung, bukan menunggu disuruh. Sehingga Menurut Kasubag Humas Kabupaten Sumba Barat, bisa jadi peristiwa tersebut menimbulkan persepsi masyarakat bahwa bagian Humas Kabupaten Sumba Barat kurang persiapan dan belum profesional dalam menjalankan tugas⁵⁸.

6) Professional

Asas umum humas tentang profesional artinya asas yang menuntut praktisi humas mengutamakan keahlian, keterampilan dan pengalaman dalam melaksanakan tugas. Ini berbeda dengan yang terjadi di bagian humas Kabupaten Sumba Barat. Bagian humas terdiri dari 6 personil, 1 kasubag dan 5 staf. Latar

⁵⁸*Ibid.*

belakang dari masing-masing staf adalah lulusan SMA. Kasubag Humas Kabupaten Sumba Barat merupakan lulusan sarjana ekonomi. Karena latar belakang yang dimiliki ini, personil di bagian humas terkadang lalai dalam menjalankan tugas, karena tidak paham akan apa yang harus dilakukan. Kasubag Humas Kabupaten Sumba Barat ditempatkan dibidang yang bukan keahliannya dan belum mempunyai pengalaman sebelumnya. Jabatan Kasubag Humas sebelumnya yaitu, sekretaris kecamatan Loli pada tahun 2017, kemudian pada bulan Mei dialihkan menjadi Kasubag Humas Kabupaten Sumba Barat.

Menurut Kasubag Humas Kabupaten Sumba Barat, Pelina Here, awalnya masih terasa berat karena tidak paham akan apa yang harus dilakukan, tidak mengetahui cara membuat siaran pers dan berita, sehingga tidak memenuhi asas profesional. Tetapi seiring berjalannya waktu, tugas-tugasnya dibantu oleh salah satu staf humas bernama Andry yang sudah lima tahun bekerja di bagian humas, sehingga pengalamannya lebih banyak.

Pemerintahan Kabupaten Sumba Barat masih belum menerapkan *the right man on the right place*. Sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa setiap aparatur sipil negara harus ditugaskan berdasarkan latar belakang pendidikan dan kompetensinya.

7) Akuntansi

Humas Kabupaten Sumba Barat mampu mempertanggungjawabkan dokumen pelaksana anggaran (DPA) secara efektif dan sesuai dengan perencanaan anggaran. Selain itu juga, mampu menghasikan *output*(hasil kinerja) berupa 128 buletin dan 12 siaran pers dalam satu tahun anggaran. Sedangkan untuk berita-berita yang dimuat melalui akun *facebook* menurut Pelina Ida M. Here tidak termasuk dalam DPA karena menggunakan dana pribadi.

8) Integritas

Bagian Humas Kabupaten Sumba Barat tidak cepat terpengaruh dengan isu-isu yang ada, selalu mempunyai komitmen yang tinggi dalam menggapai

sesuatu. Staf-staf di bagian humas juga memiliki pendirian tetap, bersikap profesional, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Semua staf humas menyadari bahwa untuk misi yang sama harus bekerja sama dan dapat menerima masukan yang bersifat positif.

4.5 Tugas dan Fungsi Bagian Humas dan Protokol Kabupaten Sumba Barat

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sumba Barat Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat, bagian humas dan protokol mempunyai tugas :

1. Melaksanakan fasilitasi perumusan kebijakan,
2. Koordinasi program dan pelayanan urusan kehumasan, dokumentasi,
3. Publikasi dan tata usaha pimpinan,
4. Acara dan tamu⁵⁹.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, kepala bagian hubungan masyarakat dan protokol, mempunyai fungsi⁶⁰:

1. Pengoordinasian penyusunan kebijakan bidang kehumasan, dokumentasi, publikasi, urusan pengumpulan informasi, pemberitaan, tata usaha pimpinan, acara dan tamu;
2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang pengumpulan informasi, pemberitaan, tata usaha pimpinan, acara dan tamu;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang pengumpulan informasi, pemberitaan, tata usaha pimpinan, acara dan tamu;
4. Pelaksanaan kegiatan kehumasan;
5. Pelaksanaan kegiatan tata usaha pimpinan, acara dan tamu; dan

⁵⁹Peraturan Bupati Kabupaten Sumba Barat Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a.

⁶⁰*Ibid.* Pasal 8 ayat (3) huruf b.

6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh asisten sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sedangkan kepala subbagian humas dan dokumentasi, memiliki tugas sebagai berikut⁶¹:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan,
- b. Pelaksanaan kebijakan,
- c. Pelaksanaan pembinaan umum,
- d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan,
- e. Penyusunan norma,
- f. Standar,
- g. Prosedur dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan,
- h. Pelaksanaan,
- i. Pemantauan,
- j. Evaluasi dan pelaporan serta harmonisasi urusan humas dan dokumentasi;

Kepala subbagian protokol memiliki tugas⁶²:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan,
- b. Pelaksanaan kebijakan,
- c. Pelaksanaan pembinaan umum,
- d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan,
- e. Penyusunan norma,
- f. Standar,
- g. Prosedur dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan,
- h. Pelaksanaan,
- i. Pemantauan,
- j. Evaluasi dan pelaporan serta harmonisasi urusan keprotokolan; dan

Dan kepala subbagian tata usaha pimpinan, acara dan tamu, memiliki tugas⁶³:

⁶¹*Ibid.* Pasal 9 ayat (3) huruf a.

⁶²*Ibid.* Pasal 9 ayat (3) huruf b.

⁶³*Ibid.* Pasal 9 ayat (3) huruf c.

- a. Penyiapan perumusan kebijakan,
- b. Pelaksanaan kebijakan,
- c. Pelaksanaan pembinaan umum,
- d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan,
- e. Penyusunan norma,
- f. Standar,
- g. Prosedur dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan,
- h. Pelaksanaan,
- i. Pemantauan,
- j. Evaluasi dan pelaporan serta harmonisasi urusan tata usaha pimpinan, acara dan tamu.

. Menurut Kepala Subbagian Humas Kabupaten Sumba Barat, tugas humas yang dijalankan selama ini sangat berbeda dengan apa yang tertulis di peraturan daerah tentang tugas humas. "Peraturan tentang tugas humas yang tertulis di peraturan daerah memang tidak pernah dirubah semenjak tahun 2016 dan asih merupakan hasil *copy paste* dari peraturan-peraturan yang sudah lama. Tetapi yang pasti, selama inibagian humas menjalankan tugas sesuai dengan prosedur yang sudah seharusnya dilakukan, tidak berpatokan dengan peraturan yang ada⁶⁴."

Dalam implementasinya bagian humas tidak dapat melaksanakan semua fungsi yang tertuang dalam peraturan bupati tersebut dan bagian humas menjalankan tugas tidak berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsiperaturan bupati, karena dokumentasi dilaksanakan oleh bagian lain. Ternyata tugas masing-masing subbagian mempunyai kesamaan.

⁶⁴Wawancara dengan Kasubag Humas Kabupaten Sumba Barat, Pelina Here pada tanggal 22 Januari 2020, pukul 10.00 WITA di Ruang Humas dan Protokol Kabupaten Sumba Barat

4.6 Produk Bagian Humas dan Protokol Kabupaten Sumba Barat

Produk-produk bagian Humas dan Protokol Kabupaten Sumba Barat meliputi *press-release*, buletin, liputan kegiatan pimpinan daerah, dan dokumentasi kegiatan-kegiatan pimpinan daerah.

Berikut contoh produk Bagian Humas dan Protokol Kabupaten Sumba Barat.

1) *Press Release*

Press Release ini diterbitkan setiap tiga bulan sekali yaitu setiap bulan Maret, Juni, September dan Desember. Namun, hanya untuk diberikan kepada kepala sekretariat daerah dan sebagai bahan pembuatan berita untuk media dari luar humas (jika diminta). *Press Release* ini diterbitkan sejak tahun 2017.

”*Press Release* merupakan tulisan yang berkaitan dengan kegiatan Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat. Tulisan tersebut menjadi bahan untuk media yang kekurangan data, sehingga *press release* bisa menjadi bahan membuat berita lengkap dengan foto (dokumentasi)⁶⁵.”

Press Release pada tahun 2017 dilaksanakan sebanyak 72 kali, 94 kali tahun 2018, dan tahun 2019 sebanyak 110 kali.

Dibawah ini merupakan contoh siaran pers yang dibuat oleh bagian Humas.

SIARAN PERS
MUSRENBANG TAHUN 2018 DI TANA RIGHU, BUPATI HARAPAN TIDAK
ADA USULAN PROGRAM YANG TUMPANG TINDIH

SP. Humas dan Protokol, 12 Februari 2018

Bupati Sumba Barat Drs. Agustinus Niga Dapawole membuka secara resmi Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan Tana Righu yang dilaksanakan di Desa Kereka Nduku Selatan. Yang dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Gregorius H.B.L Pandango, S.E, Sekretrais Daerah Kabupaten Sumba Barat, Drs. Umbu Dingu Dedi, M.Si, Anggota DPRD Dapil Tana Righu, Para Pimpinan OPD, Kepala Desa se-Kecamatan Tana Righu, para Apratur Sipil Negara, Tokoh Masyarakat, serta Warga Masyarakat Tana Righu.

⁶⁵*Ibid.*

Musrenbang berusaha menangkap aspirasi dan kebutuhan masyarakat sesuai dengan situasi, kondisi, dan perkembangan terkini. Bupati Kabupaten Sumba Barat menegaskan hal itu saat memberi sambutan pada Musrenbang. “Musrenbang merupakan wahana untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2018. Oleh karena itu hendaknya dilaksanakan dengan tertib, lancar, penuh kesungguhan sehingga menghasilkan usulan program kegiatan yang realistis dan berkualitas berdasarkan kebutuhan masyarakat bukan keinginan.”

Bupati Kabupaten Sumba barat menyampaikan dalam menyusun program pembangunan akan dibuat skala prioritas mana yang akan didahulukan dari sejumlah program pembangunan yang masuk. Sehingga mampu menuntaskan berbagai persolan dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat desa. Anggaran pembangunan yang diusulkan tidak boleh tumpang tindih yang dianggarkan desa, kecamatan dan pemerintah kabupaten.

Camat Tana Righu, Nimrot Saingo, S.Kom dalam laporannya mengatakan Musrenbang Kecamatan merupakan tindak lanjut Musrenbang Desa yang lalu. Pada kesempatan itu juga ia juga melaporkan kekurangan tenaga dibidang pendidikan yaitu tenaga pengajar berstatus Pegawai Negeri Sipil, dibidang kesehatan kekurangan tenaga bidan, tenaga perawat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga analisis, dan dokter gigi. Saat ini masing-masing puskesmas baru memiliki satu tenaga dokter umum.

Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat dalam kesempatan itu mengapresiasi Musrenbang Tingkat Kecamatan Tana Righu dan menegaskan kembali apa yang disampaikan oleh Bupati Kabupaten Sumba Barat agar setiap usulan harus benar-benar yang dibutuhkan masyarakat dan bukan keinginan pribadi.

Demikian Siaran Pers Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sumba Barat.

**Kepala Bagian Humas dan Protokol
Setda Kabupaten Sumba Barat**

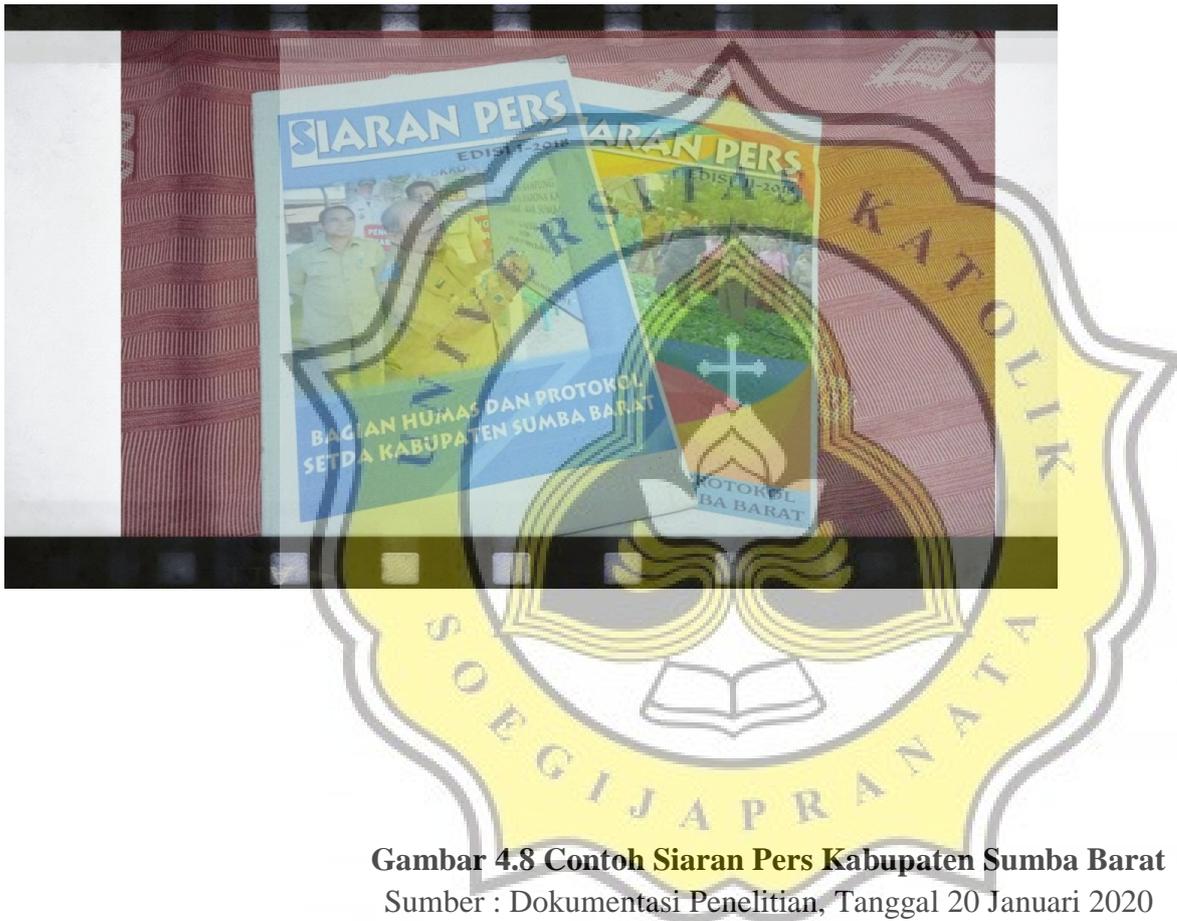
Hermanus Bili, S. Ipem

Pembina TK.I-IV/b

NIP. 19620529 1988903 1 011

Sumber : Musrenbang Tahun 2018 Di Tana Righu, Bupati Harapan Tidak Ada
Usulan Program Yang Tumpang Tindih, Humas dan Protokol Sumba
Barat, 12 Februari 2018

Agar lebih tertata saat dicetak setiap triwulan, Siaran Persyang dicetak akan dijilid seperti gambar dibawah ini:



Gambar 4.8 Contoh Siaran Pers Kabupaten Sumba Barat
Sumber : Dokumentasi Penelitian, Tanggal 20 Januari 2020

Siaran pers ini dicetak sebagai bukti hasil kerja bagian humas selama satu tahun dan nantinya akan dikumpulkan kepada sekretaris daerah. Namun, tidak untuk dibagikan kepada masyarakat umum.

2) Buletin

Buletin diadakan sejak tahun 2017 dan diterbitkan tiga bulan sekali yaitu bulan Maret, Juni, September dan Desember.



Gambar 4.9 Contoh Buletin Kabupaten Sumba Barat
 Sumber : Dokumentasi Penelitian, Tanggal 20 Januari 2020

Isi dari buletin ini adalah informasi kegiatan pimpinan daerah dan pemerintah selama tiga bulan. Informasi ini juga tidak semua bisa masuk ke buletin, karena informasi masih diseleksi oleh bagian humas berdasarkan kegiatan yang sangat penting.

Tabel 4.4. Tim Redaksi Buletin Kabupaten Sumba Barat

| No. | Jabatan | Nama |
|-----|------------------------|-------------------------------|
| 1. | Penanggung Jawab | -Drs. Agustinus Niga Dapawole |
| 2. | Wakil Penanggung Jawab | -Marthen Ngailu Toni, S.P |
| 3. | Pengarah | -Drs. Umbu Dingu Dedi, M. Si |
| 4. | Pemimpin Redaksi | -Marthen K. Naha |

| | | |
|-----|--------------------|---|
| 5. | Redaksi | -Dominggus S. B Mesa, S.S -Martha B. Imung, S.AP |
| 6. | Editor | -Irwan Mohammad Sidik |
| 7. | Redaktur Pelaksana | -Dwi Andrianto, S.ST |
| 8. | Sekretaris Redaksi | Marissa Maya Lede, A.Md |
| 9. | Staf Redaksi | -Eliyaman Welhemus Weinyi -Relywati Rambu Woji |
| 10. | Fotografer | -Jacob K. Lado |
| 11. | Sirkulasi | -Bulu P. Danguwole -Gusman H. Pandango |

Sumber : Buletin Pemda Kabupaten Sumba Barat, halaman 2.

Buletin ini hanya dibagikan ke sekitaran kantor daerah saja karena dana untuk memperbanyak buletin terbatas. Buletin hanya dicetak 30 lembar saja. Sedangkan SKPD mencapai jumlah 51 ditambah dengan kecamatan. Karena itu dalam pembagiannya, bagian humas membagikan buletin harus memilih SKPD yang memang benar-benar banyak dikunjungi oleh masyarakat. Karena keterbatasan jumlah buletin, seperti di kecamatan, Dinas Pariwisata Kabupaten Sumba Barat, dan lain-lain.

3) Liputan Kegiatan Pimpinan Daerah

Liputan kegiatan pimpinan daerah berupa foto dan berita. Setiap kegiatan Pimpinan Daerah Kabupaten Sumba Barat didokumentasikan untuk keperluan *press release* dan *update* di media sosial. Liputan kegiatan berita ini merupakan hasil dari siaran pers yang telah dibuat. Jadi sebenarnya isi berita dan siaran pers adalah sama, karena siaran pers yang dibuat bersifat jurnalistik.

Dibawah ini contoh hasil liputan kegiatan Pimpinan Daerah Kabupaten Sumba Barat melalui *facebook*:



Humas Protokol Kabupaten Sumba Barat menambahkan 17 foto baru.
20 Mei pukul 23.35 • 🌐

Bupati Dapawole Pimpin Rapat Tim Koordinasi Penyelenggara Pemerintahan Umum di Kabupaten Sumba Barat

Waikabubak_ Bupati Sumba Barat Drs. Agustinus Niga Dapawole memimpin Rapat bersama Tim Koordinasi Penyelenggara Pemerintahan Umum bertempat di Ruang Rapat Bupati. Rabu, (20/05).

Mengawali kerapatan tersebut, Bupati Dapawole menyampaikan maksud dan tujuan dari rapat ini merupakan wujud upaya kita bersama untuk memantapkan koordinasi antar lembaga dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemantauan, dan transparansi.

Demikian Siaran Pers Bagian Humas dan Protokol pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat.



Gambar 4.10 Liputan Humas Sumba Barat

Sumber: Akun Facebook Humas Kabupaten Sumba Barat, diakses pada tanggal 7 Juni 2020

4) Dokumentasi Kegiatan Pimpinan Daerah

Dokumentasi ini berupa foto tentang kegiatan Pimpinan Daerah Kabupaten Sumba Barat. Foto-foto tersebut digunakan untuk keperluan membuat berita dan dicetak, kemudian dipajang di depan ruang bupati dan wakil bupati setiap pergantian tahun.

Adapun hal-hal yang dibicarakan dalam rapat tersebut terkait keberlangsungan dan kelancaran serta perkembangan Bank NTT dalam menunjang pembangunan di Nusa Tenggara Timur.

Bupati Dapawole saat berdialog dengan Gubernur NTT menyampaikan permintaan agar Bank NTT dapat menambah unit Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di setiap Kecamatan sehingga dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan di tingkat Kecamatan.

Lebih lanjut Bupati Dapawole mengatakan saat ini Kabupaten Sumba Barat memiliki Saham di Bank NTT dalam bentuk Penyertaan Modal sebesar Rp.58.741.080.000 atau 3,99%. Diharapkan tahun ini Kabupaten Sumba Barat dapat menambah lagi penyertaan modal di Bank NTT sebagai upaya kelanjutan dan



4.11 Dokumentasi Kegiatan Bupati Sumba Barat
 Sumber: Dokumentasi Humas Kabupaten Sumba Barat

4.7 Tugas Humas Kabupaten Sumba Barat

1) Komunikasi Timbal Balik

Humas Kabupaten Sumba Barat merupakan bagian yang bertanggungjawab untuk memberikan informasi tentang semua kebijakan pemerintah. Selain itu bagianhumas seharusnya juga wadah bagi masyarakat untuk menjadi tempat pemberian kritik dan saran, tetapi untuk bagian ini sudah

merupakan tugas bagian organisasi. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat sudah mempercayakan bagian organisasi Sekretariat Daerah untuk mengurus tentang kritik dan saran melalui kotak yang disediakan. Di bawah ini penjelasan tentang tugas dan fungsi bagian organisasi.

Bagian organisasi mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi perumusan kebijakan, koordinasi program dan pelayanan kelembagaan, ketatalaksanaan, peningkatan kinerja, pembinaan pendayagunaan aparatur Negara dan analisa formasi jabatan, kepegawaia dan pengawasan melekat (Waskat).

Untuk melaksanakan tugasnya, bagian organisasi mempunyai fungsi:

1. Pengumpulan dan pengolahan serta penyiapa bahan pembiaian dan penataan kelembagaan;
2. Pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, pembinaan tata kerja, metode kerja dan prosedur kerja;
3. Pengumpulan bahan penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan evaluasi pelayanan publik;
4. Pengumpulan bahan dan penyusunan analisa formasi jabatan;
5. Pengumpula bahan penyusunan pedoman, petunjuk teknis, pembinaan, pengukuran kerja satua perangkat daerah da pengukuran kinerja daerah.

Bagian organisasi di Sekretariat Daerah bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik (DKIPS) Kabupaten Sumba Barat. Kasubag Humas Sumba Barat mengatakan kritik dan saran yang diberikan tidak semuanya dijawab oleh pemerintah, karena pemerintah akan memilih mana yang harus dijawab sesuai syarat yang sudah diberikan.

Syarat untuk memberikan kritik dan saran adalah dengan mencantumkan data diri dan alamat harus lengkap sesuai dengan KTP. Sedangkan pemerintah akan menjawab surat yang masuk sekitar dua minggu. Bagian organisasi akan melihat kritik atau pertanyaan yang masuk. Jika kritikan yang masuk berhubungan dengan jalan raya, maka bagian organisasi akan langsung berhubungan dengan kepala dinas pekerjaan umum untuk menjawab atau

memberikan *feedback* atas apa yang ditanyakan oleh masyarakat. ”Kotak kritik dan saran merupakan tanggung jawab bagian organisasi yang bekerja sama dengan DKIPS. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat sudah mempercayakan itu kepada bagian organisasi. Saat masyarakat memberikan kritik dan saran, masyarakat harus memberikan data diri, alamat secara lengkap, dan detail sesuai KTP. Setelah itu, pemerintah bisa menjawab. Sesuai hasil rapat kemarin, jangka waktu untuk menjawab pertanyaan tersebut kurang lebih dua minggu⁶⁶.”

Kasubag Humas mengatakan bagian organisasi dipercayakan dan diperintahkan langsung oleh Kepala Daerah untuk mengelola kotak kritik dan saran Kabupaten Sumba Barat.

Beberapa media dan model komunikasi digunakan oleh bagian humas untuk dapat berkomunikasi dengan masyarakat tentang apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Barat. Selain itu model komunikasi yang dilakukan Humas Kabupaten Sumba Barat dapat dilihat dengan upaya-upaya bagian humas yang langsung mendampingi kepala daerah, langsung meliput dan membuat berita. Disini, Humas Kabupaten Sumba Barat berperan sebagai:

a. Komunikator

Humas Kabupaten Sumba Barat sebagai komunikator yang memberikan informasi dan sebagai juru bicara Pemerintahan Kabupaten Sumba Barat. Bagian humas menjadi perantara antara bupati dan dinas-dinas lain, tentunya lebih spesifik dengan masyarakat dalam memberikan informasi tentang pemerintahan. Humas Kabupaten Sumba Barat memberikan informasi pemerintah kepada publik secara terbuka. Tentang siklus pengelolaan pembangunan daerah mulai dari tahap perencanaan sampai evaluasi (perencanaan, pelaksanaan, penata usaha, pemeriksaan dan pelaporan, serta evaluasi). Namun, yang ditulis dalam berita tidak secara spesifik, melainkan hanya garis besarnya saja, yang terpenting masyarakat tahu perkembangannya. Sedangkan

⁶⁶*Ibid.*

informasi yang lengkap dapat dilihat melalui situs resmi Kabupaten Sumba Barat yang dikelola oleh DKIPS. Selain itu, ada juga kegiatan Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat dan informasi yang sesuai dengan kebijakan pemerintah. Kasubag Humas Kabupaten Sumba Barat mengatakan bahwa informasi yang diberikan kepada masyarakat harus cepat dan mudah dipahami, agar tercipta saling pengertian antara pemerintah dan masyarakat. Informasi-informasi tersebut dibagikan melalui media yang tersedia yaitu *facebook* dan situs resmi Kabupaten Sumba Barat.

Kasubag Humas Kabupaten Sumba Barat mengatakan selain menjadi komunikator, bagian humas juga harus mampu menjadi mediator yang aktif yaitu dengan cara menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga mendapatkan penanganan yang tepat. Aspirasi yang dimaksud adalah keluhan-keluhan masyarakat yang berhubungan dengan pemerintah yang disampaikan melalui bagian humas baik secara langsung maupun lewat akun media sosial⁶⁷.

Bagian humas lebih banyak berperan sebagai komunikator khusus tentang kegiatan Kepala Daerah saja.

b. Pesan

Pesan disampaikan bagian Humas Kabupaten Sumba Barat kepada masyarakat melalui tulisan yang dibagikan di media sosial. Pesan yang disampaikan ini ada yang bersifat informatif yaitu pesan yang bersifat memberikan keterangan atau fakta-fakta, contohnya tahun 2019 terjadi kebakaran di salah satu kampung wisata Sumba Barat yaitu Kampung Praijijng. Dengan adanya pesan ini masyarakat Kabupaten Sumba Barat bersama-sama membantu para korban. Selain

⁶⁷*Ibid.*

itu, pesan yang disampaikan bersifat persuasif, artinya mengajak masyarakat untuk memberikan perubahan. Contohnya Bupati Kabupaten Sumba Barat mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Sumba Barat untuk bersama-sama melaksanakan senam pagi di Lapangan Manda Elu. Bagian humas juga menyampaikan pesan berupa pengumuman dari tokoh-tokoh masyarakat seperti tokoh agama, kepolisian, rumah sakit yang bertujuan untuk kepentingan bersama. Contohnya pengumuman akan diadakannya pemeriksaan SIM dan STNK pada pengendara bermotor.

Pesan yang disampaikan oleh bagian humas masih dikatakan belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi tentang pemerintah karena humas lebih banyak memberikan informasi tentang kegiatan pimpinan daerah saja.

c. Media

Media yang dimaksud adalah sarana yang digunakan untuk memberikan pesan dari sumber kepada penerima. Media yang digunakan bagian humas agar dapat berkomunikasi dengan masyarakat adalah melalui akun *facebook* dan situs resmi Kabupaten Sumba Barat. Akun *facebook* bernama Humas Protokol Kabupaten Sumba Barat berisi tentang kegiatan yang dilakukan Pimpinan Daerah Kabupaten Sumba Barat, sedangkan situs resmi <https://sumbaratkab.go.id> berisi tentang berita daerah, berita pemerintahan, infrastruktur, potensi daerah, dan informasi publik.

Kegiatan-kegiatan Pimpinan Daerah Kabupaten Sumba Barat diliput dan dibagikan di akun *facebook* Humas Protokol Kabupaten Sumba Barat. Kendala yang ditemukan adalah mengenai pendanaan. Kepala Subbagian Humas Kabupaten Sumba Barat mengatakan bahwa pengelolaan akun *facebook*, masih menggunakan dana sendiri dan inisiatif dari bagian humas. Berbeda dengan situs resmi yang

sudah memiliki anggaran dana yang telah disiapkan. ”Kalau situs resmi Kabupaten Sumba Barat yang dikelola oleh DKIPS, sudah mempunyai dananya sendiri, saya juga merupakan salah satu admin situs resmi Kabupaten Sumba Barat, bedanya saya hanya memuat berita tentang kegiatan Pimpinan Daerah Kabupaten Sumba Barat, sedangkan DKIPS memuat semua tentang pembangunan daerah Kabupaten Sumba Barat⁶⁸.”

Selain kedua akun media sosial tersebut bagian humas juga menyiapkan buletinyang berisi tentang semua informasi baik itu tentang kegiatan kepala daerah maupun kegiatan pemerintahan daerah. Buletinini dicetak setiap triwulan dan hanya dibagikan di lingkungan pemerintahan saja, tidak sampai ke masyarakat karena dana yang masih terbatas.Saat ini Humas hanya mengandalkan akun media sosial sebagai penyebar informasi untuk masyarakat.

d. Komunikasikan

Selain menjadi komunikator, bagian humas juga bisa memposisikan diri sebagai komunikan yaitu penerima pesan dari komunikator. Komunikator yang dimaksud adalah para *stockholder* dan lebih khususnya masyarakat. Bagian humas harus bisa menampung aspirasi dan mendengar apa yang ingin disampaikan oleh masyarakat kepada pemerintah. Kasubag Humas Kabupaten Sumba Barat, Pelina Ida M. Here, mengatakan bagian humas selalu berusaha menjadi pendengar yang baik terkait dengan aspirasi masyarakat lewat komentar di media sosial maupun masukan dari masyarakat yang nantinya akan menjadi bahan evaluasi pengambilan keputusan oleh Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat⁶⁹.Bagian humas juga berperan sebagai komunikan yaitu dengan mendengar aspirasi dari masyarakat

⁶⁸*Ibid.*

⁶⁹*Ibid.*

lewat komentar-komentar di media sosial khususnya *facebook* maupun masukan yang diberikan oleh masyarakat secara langsung.

2) Kelancaran Informasi dan Aksesibilitas Publik

Selain akun *facebook*, humas juga mempunyai situs resmi yang bekerja sama dengan DKIPS. Kedua media ini membantu masyarakat untuk mudah mengakses informasi tentang pemerintahan. Informasi yang diberikan berupa kegiatan pimpinan daerah, pembangunan dan program-program pemerintah.

Bagian humas memastikan masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi. Pada kenyataannya saat ini bagian humas hanya bisa memberi informasi kepada masyarakat lewat akun media sosial *facebook*. Hal tersebut juga sangat terbatas karena tidak semua masyarakat Kabupaten Sumba Barat memiliki akun *facebook*, bahkan ada yang tidak mengerti apa itu *facebook*. Sampai saat ini belum ada solusi yang bisa dilakukan oleh bagian humas untuk mengatasi masalah-masalah di atas. Bagi instansi lain, bagian humas hanya membagikan buletinyang jumlahnya terbatas, mengingat anggaran dana yang tidak mencukupi. Dana yang tersedia hanya untuk mencetak 30 buletinsaja, sedangkan SKPD yang ada berjumlah lebih dari itu. Karena itu bagian humas biasanya memilih SKPD yang banyak dikunjungi oleh masyarakat agar mudah mengakses informasi lewat buletin.

Bagian humas juga terkadang memberikan akses kepada wartawan untuk mengambil berita tentang kegiatan pemerintah agar dibagikan kepada masyarakat luas. Wartawan yang dimaksudkan adalah wartawan dari provinsi atau luar pulau Sumba. "Jika ada acara besar seperti Festival Seribu Satu Kuda yang diadakan tahun lalu, biasanya para wartawan akan menghubungi bagian humas untuk meminta *siaran pers* sebagai bahan untuk membuat berita." Ini terjadi jika ada acara besar saja, bagian humas tidak secara langsung bekerja sama dengan wartawan atau media⁷⁰.

⁷⁰*Ibid.*

Selain kelancaran informasi, bagian humas juga memastikan masyarakat mendapatkan akses yang mudah dan lengkap untuk mempublikasikan pembangunan-pembangunan yang diadakan pemerintah seperti pembuatan jalan raya, pembangunan rumah sakit di daerah terpencil, penyediaan jembatan, penyediaan air untuk memudahkan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari.

Sumber informasi dari bagian humas hanya bisa diakses oleh masyarakat yang memiliki akun *facebook* saja. Meski begitu, Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat terus berusaha melakukan pembangunan-pembangunan jalan raya, rumah sakit dan semua fasilitas di desa tertinggal atau pelosok agar masyarakat dapat menikmatinya.

3)Koordinasi

Humas Kabupaten Sumba Barat merupakan gerbang informasi bagi masyarakat. Oleh karena itu informasi yang diberikan bagian humas merupakan informasi benar dan akurat, sehingga dituntut untuk berkoordinasi dengan pemerintahan, para *stockholder*, OPD lain, dan yang terpenting dengan media.

Dalam hal koordinasi, bagian humas melakukan koordinasi dengan semua pihak baik itu kepala daerah maupun OPD, seperti kegiatan dan program yang dilaksanakan. Koordinasi ini bertujuan agar visi dan misi pemerintahan Kabupaten Sumba Barat dapat tercapai. Dalam hal membangun hubungan bersama OPD lain, teknisnya bagian humas hanya menunggu informasi dari setiap OPD yang akan melaksanakan program atau kegiatan untuk menyampaikan kepada kepala daerah. Bagian humas akan koordinasi secara langsung dengan kepala daerah tanpa perantara. Bagian humas melakukan koordinasi dengan kepala daerah mengenai acara khusus dalam lingkup pemerintahan.”Bagian humas hanya berkoordinasi dengan kepala daerah, terkadang bagian humas juga melakukan koordinasi dengan SKPD lain, tetapi khusus tentang acara yang akan diadakan. Karena bagian humas akan menangani acara tersebut dan

mempublikasikan berita di media sosial maupun situs resmi Kabupaten Sumba Barat⁷¹.”

Membangun hubungan yang akrab dengan SKPD lain juga merupakan hal penting, menjalin komunikasi yang baik agar lebih mudah dalam melaksanakan pekerjaan. Ini juga bertujuan agar nantinya antara Humas dan SKPD lain dapat mudah saling berkoordinasi untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Mekanisme koordinasi antara SKPD dan humas lewat komunikasi secara lnsung atau melalui surat yang ditujukan kepada Humas agar kegiatan yang diadakan dapat diliput dan dibagikan ke akun *facebook*.

Kasubag Humas Kabupaten Sumba Barat, Pelina Ida M. Here, menyatakan bahwa mekanisme koordinasi dengan instansi lain adalah dengan cara instansi yang akan mengadakan kegiatan atau rapat langsung menghubungi bagian humas melalui *whatsapp* pribadi Kasubag Humas Kabupaten Sumba Barat atau bisa juga melalui surat yang ditujukan langsung kepada bagian Humas dan Protokol Kabupaten Sumba Barat. Penyampaian ini bermaksud agar bagian humas dapat meliput dan mempublikasikan kegiatan yang dilakukan dan dibagikan kepada masyarakat⁷².

Hasil dari koordinasi bagian humas dan instansi lain adalah untuk kepentingan informasi yang dibutuhkan masyarakat sesuai dengan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pembangunan-pembangunan di Kabupaten Sumba Barat, sehingga diharapkan tujuan bersama dapat tercapai. Untuk koordinasi yang dilaksanakan atau diadakan oleh bagian humas itu sendiri seperti mengadakan rapat dengan instansi lain tidak pernah dilakukan karena humas disini tidak memiliki wewenang.

4) Citra dan Reputasi Pemerintah Kabupaten Sumba Barat

⁷¹*Ibid.*

⁷²*Ibid.*

Citra dan reputasi yang ingin dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Barat adalah citra yang baik, ini bertujuan agar terciptanya kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat. Bagian Humas Kabupaten Sumba Barat membangun pemerintah yang melayani, inovatif, dan pemerintah yang memberikan solusi permasalahan masyarakat.

Visi dari Pemerintah Kabupaten Sumba Barat adalah mewujudkan masyarakat Kabupaten Sumba Barat yang mandiri, demokratis, dan sejahtera, dan berbasis sumber daya lokal. Selain itu pemerintah Kabupaten Sumba Barat menggunakan prinsip *good governance*, khususnya prinsip transparansi. Masyarakat diharapkan dapat dengan mudah mengakses dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Informasi ini dapat diketahui melalui *website* Kabupaten Sumba Barat.

Pemerintah Kabupaten Sumba Barat saat ini sudah cukup memiliki reputasi sesuai citra yang baik di mata masyarakat. Ini ditandai dengan pembangunan-pembangunan yang terus dilakukan pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Selain itu usaha Pemerintah Kabupaten Sumba Barat yang terus melayani masyarakat dengan baik juga sudah dirasakan sendiri oleh masyarakat lewat program-program pemerintah dan dilihat oleh para pemangku kepentingan.

Selain itu, menurut Kasubag Humas Kabupaten Sumba Barat, citra Pemerintah Kabupaten Sumba Barat sudah semakin baik, karena didukung dengan penyebaran informasi secara berkala. Perkembangan pembangunan di Kabupaten Sumba Barat juga sudah cukup baik sehingga masyarakat dapat hidup dengan aman dan nyaman. ”Menurut saya, citra Kabupaten Sumba Barat cukup bagus, hal ini dibuktikan dengan banyaknya pembangunan, perbaikan sarana dan prasaranana yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, sehingga masyarakat bisa merasakan dan menikmati pembangunan ini⁷³.”

⁷³*Ibid.*

Dalam membangun citra dan reputasi, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat menjalankan dua peran humas, yaitu:

a. Teknisi Komunikasi

Teknisi komunikasi merupakan peran dasar seorang praktisi humas. Peran ini merupakan tugas humas dalam menyampaikan informasi mengenai kegiatan dan program-program kebijakan pembangunan Pemerintah melalui media. Humas Pemerintah Kabupaten Sumba Barat menjalankan dua peran, yaitu:

1) Menerbitkan *Press Release*

Press Release diterbitkan sebanyak 72 kali, 94 kali tahun 2018 dan tahun 2019 sebanyak 110 kali. *Press Release* ini berisi tentang kegiatan pimpinan daerah dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.

2) Bekerja sama dengan media

Media yang pernah bekerja sama dengan Humas Pemerintah Kabupaten Sumba Barat adalah media cetak Pos Kupang tahun 2016. Tetapi ini hanya khusus acara yang besar saja dan tidak menjalin kerjasama secara resmi dan berlanjutan.

Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Bagian Humas dan Protokol Kabupaten Sumba Barat dan media adalah dengan menerbitkan *press release* yang bersifat jurnalistik. *Press release* ini akan diberikan kepada media yang membutuhkannya sebagai dasar pembuatan berita khususnya tentang kegiatan di Kabupaten Sumba Barat. Langkah ini dipercaya oleh bagian humas dapat meminimalisir munculnya berita-berita yang berisi isu tidak baik tentang Pimpinan Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Humas juga selalu *update* informasi tentang kegiatan pimpinan daerah dan dibagikan di akun *facebook*. Ini sebagai wujud Pemerintah Kabupaten Sumba Barat dalam melaksanakan *good governance* yaitu transparansi. Transparansi dilakukan agar masyarakat dapat mengetahui dan mengontrol kegiatan

pemerintahan. ”Sebenarnya, semenjak berita dari humas ini *update* baik dari *facebook* maupun *website*, tanpa kotak saranpun semua pertanyaan masyarakat tentang apa yang dikerjakan pemerintah dengan sendirinya terjawab. Karena masyarakat mengetahui apa saja yang dilakukan pemerintah saat ini. Sebelumnya khusus untuk kepala daerah, masyarakat menjuluki mereka dengan kata lima dua, yang artinya lima hari di luar daerah dan dua hari di dalam daerah (Kabupaten Sumba Barat). Makna dari julukan ini seolah-olah kepala daerah hanya pergi untuk bersenang-senang. Tetapi dengan adanya berita-berita yang selalu dirilis setiap hari tentang kegiatan kepala daerah, masyarakat jadi paham apa saja yang dilakukan oleh kepala daerah, yaitu koordinasi, konsultasi agar Kabupaten Sumba Barat bisa mendapatkan banyak bantuan dari kementerian⁷⁴.”

Selain itu, bagian humas juga bekerja sama dengan DKIPS dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Namun, hanya informasi tentang kegiatan pimpinan daerah saja, sedangkan DKIPS memberikan informasi tentang pembangunan di pemerintahan Kabupaten Sumba Barat.

b. Penasihat Ahli

Peran humas sebagai penasihat ahli, bertugas memberikan nasihat atau masukan kepada kepala daerah tentang permasalahan-permasalahan yang terkait dengan kehumasan. Sebagai penasihat ahli, bagian humas memberikan masukan dan nasihat kepada kepala daerah agar lebih dekat dengan masyarakat. Ini bertujuan untuk membangun citra dan reputasi yang baik.

Hal tersebut dijelaskan oleh Kasubag Humas Kabupaten Sumba Barat dan sering disampaikan kepada bupati untuk tidak terprovokasi oleh kata-kata ejekan di media sosial. Karena dengan begitu bisa membentuk citra kepala daerah yang juga berdampak kepada seluruh pemerintahannya⁷⁵. Jika masukan diterima, maka bagian humas sudah berhasil menjalankan perannya sebagai penasihat ahli untuk pimpinan daerah.

⁷⁴*Ibid.*

⁷⁵*Ibid.*

c. Fasilitator Komunikasi

Peran sebagai fasilitator komunikasi, bagian humas bertugas sebagai mediator informasi antara kepentingan pemerintah dan *stockholder*. Peran ini dilaksanakan dengan kegiatan:

1) *Press Conference*

Press conference ini dilakukan ketika SKPD yang membutuhkan promosi di media. Hal tersebut dilakukan ketika dibutuhkan saja. Contohnya ketika gedung dinas bappeda akan diresmikan oleh bupati, maka bagian humas akan meliput dan mempublikasikan berita tersebut.

2) Media Monitoring

Media monitoring dilakukan untuk mengawasi persebaran berita sehingga dapat mengantisipasi adanya isu yang beredar di masyarakat. Bagian humas dan protokol dapat langsung menanggapi isu tersebut sebelum menjadi krisis. Contohnya subbagian humas mengumpulkan berita di surat kabar yang memuat tentang Kabupaten Sumba Barat untuk dianalisis adanya kecenderungan isu baik atau buruk.

Peran sebagai fasilitator komunikasi dilaksanakan bagian Humas dan Protokol Kabupaten Sumba Barat dengan menyediakan apa yang diinginkan oleh pemerintah dan masyarakat agar dapat berjalan beriringan atau seimbang. Humas berperan sebagai fasilitator antara pemerintah dengan media massa.

Humas Kabupaten Sumba Barat telah berhasil bertindak sebagai perantara, interpreter, dan mediator antara Pemerintah Kabupaten Sumba Barat dengan masyarakat. Bagian humas menyiapkan bahan informasi yang akan diberikan kepada masyarakat dengan baik. Selain itu, membuka akses dan saluran komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat dengan membuat akun *facebook* pada tahun 2017 dan situs yang baru diresmikan tahun 2018. Dengan media informasi tersebut, masyarakat dapat berkomunikasi dengan pemerintah walaupun secara tidak langsung yang diwakili oleh bagian humas.

Untuk akses komunikasi secara langsung sampai saat ini humas hanya menanggapi pertanyaan yang diberikan oleh masyarakat jika humas turun langsung mengikuti kegiatan masyarakat. Kasubag humas mengatakan, kotak saran yang tersedia bukan menjadi tanggung jawab bagian humas, itu sudah menjadi tanggung jawab bagian organisasi⁷⁶.

d. Fasilitator Pemecah Masalah

Bagian human berperan sebagai fasilitator pemecah masalah, seperti memecahkan masalah-masalah isu dan krisis yang menimpa pemerintah daerah. Kasubag humas mengemukakan bahwa dalam beberapa kasus, bagian humas bisa memecahkan masalah dan memberikan solusi atau klarifikasi melalui media sosial untuk disampaikan kepada masyarakat. Biasanya humas akan berdiskusi dengan bupati atau sejarannya dengan persetujuan bupati untuk membahas isu-isu yang menjatuhkan citra pemerintahan⁷⁷.

Masalah yang terjadi adalah pemberitaan di media massa yang sulit dikendalikan oleh bagian Humas Kabupaten Sumba Barat. Humas Kabupaten Sumba Barat dalam mengatasi hal tersebut mengambil tindakan dengan tidak mengedarkan berita tersebut kepada masyarakat luas maupun instansi lain. Biasanya berita tersebut datang dari media massa provinsi di kota Kupang.

Selain itu Humas Kabupaten Sumba Barat membantu pihak manajemen dan mendengarkan apa yang diinginkan oleh masyarakat dan bisa menjelaskan keinginan kebijakan dan harapan masyarakat sehingga bisa terjadinya saling pengertian satu sama lain.

Humas Kabupaten Sumba Barat sudah menjalankan keempat peran humas. Kasubag humas menambahkan keempat peran ini dengan komitmen harus dijalankan, karena bagian humas merupakan penghubung antara pemerintah dan

⁷⁶*Ibid.*

⁷⁷*Ibid.*

pemangku kepentingan dengan masyarakat. Selain itu juga agar tujuan, visi, dan misi dapat tercapai⁷⁸.

Dalam membangun hubungan internal dan eksternal, tidak hanya dilakukan oleh bagian humas dan protokol saja, tetapi juga oleh DKIPS atau dinas komunikasi dan informatika, serta persandian dan statistik. Bagian Humas dan Protokol Kabupaten Sumba Barat menjalankan tugas yaitu, melayani pimpinan daerah seperti bupati, wakil bupati dan sekretaris daerah. Untuk tugas keseluruhan atau Pemerintah Kabupaten Sumba Barat dijalankan oleh DKIPS.

4.8 Mekanisme Hubungan Internal dan Eksternal Pemerintah Kabupaten Sumba Barat

1) Mekanisme Hubungan Internal

Dalam membangun citra dan reputasi, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat melakukan rapat koordinasi pembangunan daerah setiap bulan. Rapat akan dipimpin langsung oleh bupati. Setiap SKPD akan berkumpul dan akan diadakan evaluasi sejauh mana tentang apa yang sudah dikerjakan oleh masing-masing SKPD, setelah itu mengevaluasi pembangunan-pembangunan yang masih harus dibiayai. Rapat ini bertujuan untuk menyelaraskan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sumba Barat, sehingga citra dan reputasi dapat terbentuk. Bagian humas juga akan memberikan informasi-informasi atau himbuan yang diberikan oleh kepala daerah melalui surat edaran resmi.

Selain itu, membangun hubungan internal bertujuan untuk mewujudkan *good governance* yang dilaksanakan bersama-sama oleh setiap SKPD. Caranya adalah dengan mempublikasikan program kegiatan pemerintah kepada masyarakat. Kegiatan ini merupakan tugas dari DKIPS Kabupaten Sumba Barat yang bertanggung jawab dalam publikasi seluruh kegiatan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.

⁷⁸*Ibid.*

Publikasi tersebut dilaksanakan menggunakan situs resmi Kabupaten Sumba Barat dan informasinya mencakup tentang seluruh OPD Kabupaten Sumba Barat. Mekanismenya pelaksanaannya yaitu berkoordinasi dengan setiap OPD dan mendapat berita untuk dipublikasikan. Sedangkan yang melakukan koordinasi ini adalah bagian humas dan menginformasikan kepada DKIPS. DKIPS mengetahui kegiatan setiap OPD Pemerintah Kabupaten Sumba Barat untuk keperluan publikasi. Publikasi ini bertujuan untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat dan supaya masyarakat ikut berpartisipasi terhadap kegiatan pemerintah.

Peran bagian humas sebagai perantara antara OPD dengan DKIPS. Humas menginformasikan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh OPD kepada DKIPS agar dipublikasikan. Humas juga bisa melakukan liputan pada kegiatan OPD tetapi informasinya lebih mengarah kepada pimpinan daerah yang menghadiri kegiatan tersebut.

2) Mekanisme Hubungan Eksternal

Mekanisme hubungan eksternal yang dilakukan oleh Bagian Humas Kabupaten Sumba Barat saat ini untuk menjalin hubungan dengan media massa luar masih belum dilakukan. Dikarenakan humas masih mengandalkan media yang dimiliki sendiri untuk menyebarkan informasi. Walaupun ada media yang meliput kegiatan pemerintahan, itu karena ada kegiatan besar yang dihadiri oleh presiden, menteri, gubernur maupun kegiatan skala besar.

Bagian humas masih belum bisa membangun kerjasama dengan media dari luar, karena Kasubag Humas Kabupaten Sumba Barat mengatakan, sampai saat ini belum menjalin kerja sama dengan media luar daerah⁷⁹.

⁷⁹*Ibid.*

4.9 Hambatan Bagian Humas dalam Menjalankan Tugasnya

Dalam menjalankan tugasnya, tentunya Humas Kabupaten Sumba Barat menghadapi berbagai hambatan. Hambatan-hambatan tersebut adalah:

- 1) Tugas humas yang tertulis dalam peraturan daerah tidak sesuai dengan apa yang dijalankan selama ini.
- 2) Berita hanya ditulis oleh kepala subbagian humas saja.
- 3) Kurangnya semangat dari para stafhumas.
- 4) Mengalami kesulitan untuk menyelaraskan kepentingan pemerintah dan kepentingan media, karena terkadang kepentingan media dan pemerintah sangat berbeda.
- 5) Tidak ada anggaran dana untuk mengelola media sosial *facebook* dan kurangnya anggaran dana untuk memperbanyak buletin.
- 6) Berita tentang kegiatan Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat hanya dibagikan melalui *fecabook* dan situs resmi, sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui informasi karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang meningkatnya teknologi era sekarang. Solusi yang harus dilakukan adalah dengan menggunakan teknik sosialisasikepada masyarakat tentang teknologi dan informasi.